

Diplomasi Kesehatan di Era Pandemi Global: Analisa Bantuan Penanganan Covid-19 dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia

**Adiasri Putri Purbantina*1)
Renitha Dwi Hapsari*2)**

*Dosen Program Studi Hubungan Internasional*1)
Dosen Program Studi Hubungan Internasional*2)
UPN “Veteran” Jawa Timur*

*email: adiasri.hi@upnjatim.ac.id *1)
email: renithadwi.hi@upnjatim.ac.id *2)*

ABSTRACT

Currently, the world is experiencing a threat against human security due to the spread of Covid-19. The WHO have initiated global health diplomacy since 2007 to tackle the global health crisis. This often takes form of a multilateral cooperation seeking to construct a collective action. Actors working together to promote a global policy recommendation. This paper seeks to argue that we can observe a duality of health diplomacy using the case of Covid-19. On one side, a collective action is a crucial element to tackle a global issue. However, on the other hand, a collective action a form of diplomacy of one country aiming to pursue specific economic interest. In the case of health diplomacy from Japan and South Korea to Indonesia, the longevity of global value chain becomes the prominent economic interest.

Keywords: *human security, global value chain, health diplomacy*

Saat ini, dunia sedang mengalami ancaman keamanan akibat penyebaran virus Covid-19, yang menjadi pandemi global. Pada dasarnya, guna mengatasi masalah kesehatan secara global, sejak tahun 2007 WHO menginisiasi global health diplomacy yang merupakan bentuk komitmen dan kerja sama multilateral yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Konsep global health diplomacy merujuk pada proses negosiasi multilevel dan multiaktor yang dilakukan guna membentuk dan mengatur kebijakan global untuk kesehatan. Tulisan ini hendak menggarisbawahi bahwa ada dualitas yang dapat kita observasi. Di satu sisi, terdapat pentingnya sebuah aksi kolektif dalam mengatasi isu pandemik yang mengancam keamanan seluruh manusia secara global. Di sisi lain, tulisan ini mengajukan argumen bahwa aksi kolektif dalam menangani COVID-19 juga memiliki nilai lebih sebagai suatu bentuk diplomasi yang dilandasi kepentingan ekonomi yang tangible. Keberlangsungan sistem produksi global sangat dipengaruhi oleh hubungan bilateral yang kondusif dan sekaligus bebas dari ancaman terhadap keselamatan manusia.

Kata Kunci: *keamanan manusia, sistem produksi global, diplomasi kesehatan*

Pendahuluan

Saat ini, dunia sedang mengalami ancaman keamanan akibat penyebaran virus Covid-19, yang menjadi pandemi global. Virus Covid-19 merupakan *coronavirus* yang disebut pertama kali muncul di pasar binatang di Kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 (WHO 2020). Seperti SARS, MERS, dan penyakit menular lainnya, Virus Covid-19 telah ditetapkan sebagai ancaman terhadap kesehatan manusia secara global oleh WHO. WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Hanya dalam waktu 4 bulan, penyebaran Covid-19 telah mencapai 114 negara di dunia. Dalam pernyataannya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa selama dua minggu terakhir

terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan sebanyak 13x lipat, dan negara yang terkena kasus meningkat 3x lipat (Cucinotta 2020). Pada saat itu, Direktur Jenderal WHO juga menyebutkan bahwa jumlah korban Covid-19 telah mencapai lebih dari 4.000.000 kasus (WHO 2020). Dikatakan bahwa jumlah tersebut bisa lebih tinggi dari prediksi, karena masih banyak kasus yang belum terdeteksi. Perubahan status menjadi pandemi ini ditetapkan ketika penyebaran terjadi dengan sangat cepat dari manusia ke manusia di berbagai belahan dunia secara global, hingga mencapai wilayah yang sangat jauh dari pusat wabah.

Sebagai sebuah pandemi global, penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama antara berbagai negara di dunia untuk mencegah penyebarannya. Terkait dengan hal ini, maka seiring dengan meningkatnya jumlah penderita Covid-19 di seluruh dunia, maka pemerintah di berbagai negara tidak hanya menetapkan kebijakan *lockdown* tetapi juga menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Negara-negara maju kemudian menawarkan berbagai macam bantuan kesehatan kepada negara-negara berkembang. Diplomasi kesehatan terkait penanganan isu keamanan manusia ini lah yang kemudian menarik untuk dibahas lebih lanjut. Tulisan ini menggunakan kasus diplomasi kesehatan dari negara Jepang dan negara Korea Selatan kepada Indonesia untuk membuka diskusi mengenai kepentingan ekonomi di balik penanganan isu pandemik global.

Health and Human Security: Covid-19

Konsep ancaman keamanan saat ini tidak hanya berfokus pada ancaman keamanan tradisional yang mengancam keamanan nasional negara, namun berkembang meliputi ancaman non-tradisional yang lebih berfokus terhadap keamanan manusia sebagai individu maupun kelompok sebagai *referent object*. Human Development Report UNDP (1994) mendefinisikan ancaman keamanan secara lebih luas, keamanan manusia meliputi keamanan dari ancaman kelaparan, penyakit menular dan represi atau instabilitas politik, serta upaya perlindungan dari disrupsi yang mengancam pola kehidupan manusia sehari-hari, baik di tempat tinggal, lingkungan kerja maupun komunitas masyarakat. Secara lebih lanjut, UNDP mengemukakan tujuh elemen kebutuhan dasar keamanan manusia, yang meliputi: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik (UNDP 2006).

Dalam sejarahnya, keamanan kesehatan menjadi perhatian sejak tahun 1990-an, seiring dengan penyebaran penyakit menular, pandemik HIV/AIDS, serta penggunaan senjata biologis termasuk dalam kegiatan terorisme -dikenal sebagai bioterorisme. Dalam hal ini, globalisasi menjadi salah satu katalisator penyebaran penyakit seiring dengan peningkatan migrasi lintas batas negara, kegiatan bisnis dan perdagangan, serta perjalanan wisata. Penyebaran Covid-19 yang kemudian menjadi pandemi global juga terjadi karena hal ini, sehingga pemerintah di berbagai negara kemudian menerapkan kebijakan *lockdown*, sebagai langkah sekuritisasi agar penyebaran tidak semakin meluas dan korban semakin meningkat.

Dalam perkembangannya, penyebaran Covid-19 tidak hanya menyebabkan disrupsi sosial dan mengancam stabilitas negara dengan penurunan ekonomi yang sangat signifikan, tetapi juga menyebabkan ancaman langsung terhadap kesehatan manusia di berbagai negara secara global. Hingga 15 Juni 2020, berdasarkan data Johns Hopkins University, tercatat 7.782.809 kasus Covid-19 di lebih dari 200 negara, dengan total 430.613 korban meninggal dari seluruh dunia (BBC News 2020). Jumlah pasien terinfeksi Covid-19 cenderung fluktuatif di tiap negara. Di beberapa negara, saat ini jumlah kasus pasien yang terinfeksi mulai menurun atau telah melewati masa puncak, sedangkan di beberapa negara lainnya justru semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus Covid-19 juga masih terus

meningkat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 15 Juni 2020, tercatat 39.294 kasus pasien terinfeksi, dengan total 2.198 korban meninggal dunia (BBC News Indonesia 2020). Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati ranking ke-22 sebagai negara dengan total kematian tertinggi akibat Covid-19. Jika tidak segera diatasi, penyebaran Covid-19 dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia secara global.

Guna mengatasi masalah kesehatan secara global, sejak tahun 2007 WHO menginisiasi Global Health Diplomacy yang merupakan bentuk komitmen dan kerjasama multilateral yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Konsep Global Health Diplomacy merujuk pada proses negosiasi multilevel dan multiaktor yang dilakukan guna membentuk dan mengatur kebijakan global untuk kesehatan (Kickbusch 2007). Global health diplomacy menjadi katalisator bagi *global health governance*, yang mendorong terbentuknya kesepakatan dan perjanjian internasional, baik di level multilateral maupun bilateral. Berkaitan dengan penanganan Covid-19, WHO dalam kerangka Global Health Diplomacy menyerukan komitmen politik dan koordinasi politik di tingkat global, terutama para pemimpin kelompok negara-negara G20, untuk mendorong kerja sama guna meningkatkan produksi peralatan pelindung, menghindari larangan ekspor dan memastikan pemerataan distribusi alat-alat kesehatan atas dasar kebutuhan (BBC News Indonesia 2020). Selain itu, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi A/74/L.52 mengenai Global Solidarity to Fight Covid-19 pada 2 April 2020 (The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 2020).

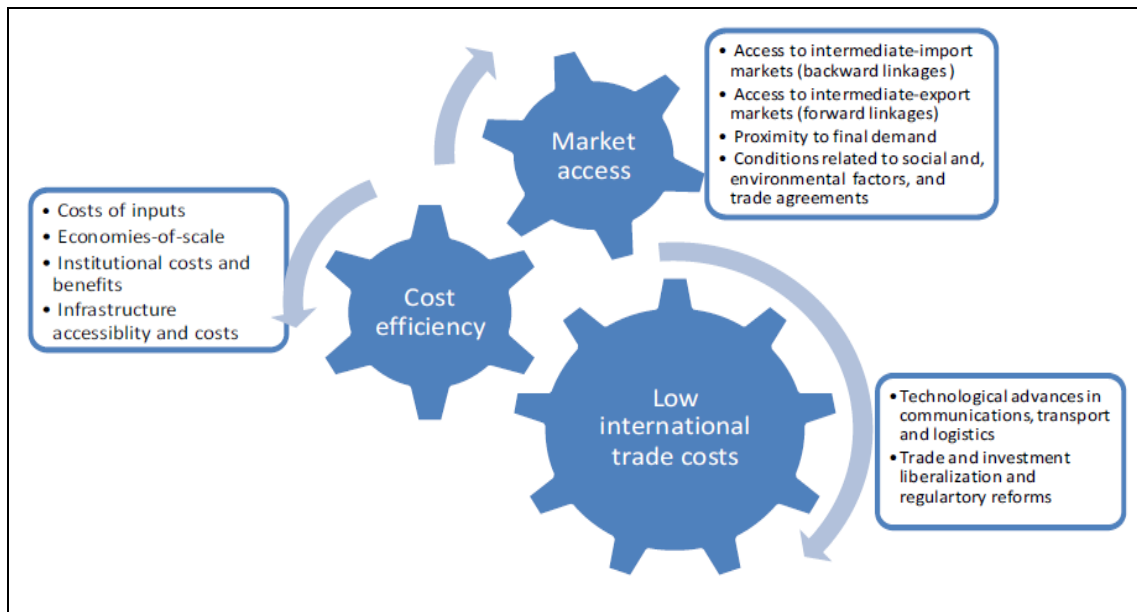
Resolusi tersebut menekankan upaya persatuan, solidaritas, dan kerjasama secara global guna memitigasi dan mengatasi Covid-19. Dalam resolusi tersebut disebutkan pentingnya kerjasama internasional yang lebih intensif untuk mengontrol, memitigasi dan mengatasi pandemi, serta komitmen untuk membantu masyarakat, terutama yang rentan dan lemah, serta merekognisi upaya dari pemerintah di berbagai negara yang menawarkan bantuan dan dukungan sebagai bentuk solidaritas dan hubungan yang mutual. Komitmen tersebut secara implisit, juga menekankan *equity* akses kesehatan bagi semua individu baik di level nasional, regional, maupun global, mengingat bahwa pandemi tidak hanya terjadi di negara maju tetapi juga negara berkembang dan negara miskin.

Sistem Produksi Global (Global Value Chain)

Ketika kita berbicara mengenai diplomasi dari negara A ke negara B, maka kita berbicara mengenai kepentingan negara A terhadap negara B. Kepentingan ekonomi kemudian adalah jenis kepentingan utama yang biasanya mendasari diambilnya suatu langkah diplomasi. Utamanya di era ekonomi global saat ini, perekonomian suatu negara sangat berkaitan dengan negara lain. Interdependensi ekonomi menjadi hal yang mudah untuk diobservasi, baik melalui arus perdagangan maupun arus modal. Salah satu kunci utama dalam memahami interdependensi ini adalah dengan mengevaluasi perkembangan sistem produksi global yang seringkali juga disebut dengan *global value chain*.

Global Value Chain (GVC) atau sistem produksi global secara sederhana mengacu kepada suatu bentuk fragmentasi sistem produksi. Seiring dengan gelombang globalisasi ekonomi, saat ini sistem produksi terbagi menjadi beberapa tahapan produksi yang lokasinya tersebar secara global di berbagai negara-negara berbeda di dunia. Dengan kata lain, GVC menghubungkan *firms*, *regions*, dan *nations* di dalam suatu pasar global (Neilson et al. 2014). GVC memainkan peranan penting dalam globalisasi ekonomi, yang dimulai dari ekspansi sistem produksi perusahaan multinasional (MNCs) di sektor industri elektronik dan industri pakaian. Ekspansi sistem produksi global ini semakin dipercepat oleh perkembangan teknologi dan implementasi kebijakan liberalisasi di berbagai negara di dunia (Gambar 1). MNCs, utamanya dari negara-negara maju, tetap menjadi aktor utama walaupun ada peningkatan partisipasi aktor lokal (*domestic firms*) (Athukorala 2010).

Gambar 1. The Global Value Chain



Sumber: “Global Value Chains, Regional Integration and Sustainable Development: Linkages and Policy Implications” (UNESCAP 2015)

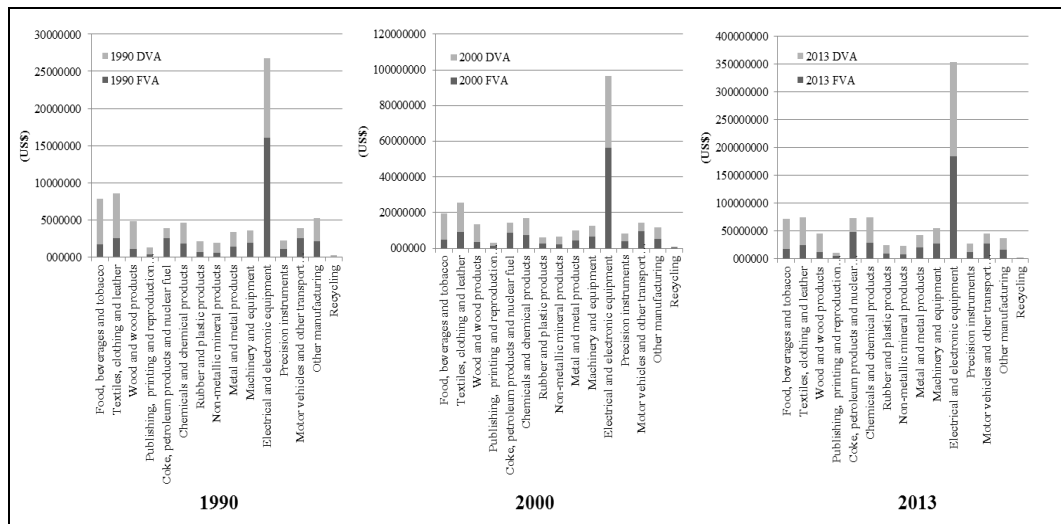
Pada dasarnya GVC dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah *formative stage*, dimana sebuah produksi barang mencakup potongan-potongan fragmen (barang setengah jadi) proses produksi yang berlokasi di negara-negara *low cost*. Barang setengah jadi ini kemudian akan diekspor untuk dirangkai menjadi sebuah produk akhir di negara lain. Tahapan kedua adalah proses masuknya barang-barang setengah jadi dari berbagai batas negara untuk melalui proses perakitan atau perangkaian menuju produk akhir. Tujuan utama fragmentasi produksi ini adalah demi pencapaian efisiensi produksi yang membutuhkan tenaga kerja murah ataupun akses pasar yang lebih dekat (Athukorala 2010).

Secara mendasar, pada era global ini sektor manufaktur adalah sektor yang menyumbangkan kontribusi pada GDP paling besar. Sektor manufaktur, pada kenyataannya, mampu menyerap banyak tenaga kerja pada suatu negara. Sehingga ini berperan besar dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya. Penelitian oleh UNIDO (2018) menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan pendapatan nasional yang berhasil dilakukan oleh negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina, sangat erat kaitannya dengan meningkatnya kontribusi sektor manufaktur dalam GDP. Sedangkan terjebaknya negara-negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brazil dalam tingkat pendapatan nasional di level *middle-income* sangat dipengaruhi oleh lambatnya pertumbuhan sektor manufaktur.

Seiring dengan sistem produksi manufaktur yang sangat didasarkan pada GVC ini, maka hubungan ketergantungan ekonomi antara negara-negara *host* dan *home* menjadi semakin erat. Inilah sebabnya kemudian MNCs dari negara-negara maju (*home countries*) memiliki kepentingan di negara-negara berkembang (*host countries*) bagi efisiensi produksi mereka. Negara-negara berkembang, seperti sebagian besar negara ASEAN, kemudian memiliki nilai penting sebagai penyedia sumber daya alam sebagai *raw materials* produksi dan juga penyedia tenaga kerja (*labour*) yang lebih murah. Tidak hanya sebagai penyedia faktor produksi utama, negara-negara berkembang juga sekaligus menjadi pasar yang penting bagi produk MNCs. Singkatnya, di satu sisi negara-negara *home* mendapatkan keuntungan dari efisiensi produksi MNCs mereka, sedangkan negara-negara *host* mendapatkan keuntungan

dengan terserapnya tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional¹. Di ASEAN misalnya, pentingnya peran MNCs dalam GVC dapat dilihat pada dominasi *share foreign value-added* berbanding *share domestic value-added* pada sebagian besar sektor industri manufaktur, utamanya sub-sektor elektronik dan otomotif (Gambar 2). Keduanya adalah dua sub-sektor *medium-level technology* yang paling banyak berkontribusi pada pendapatan nasional di berbagai negara.

Gambar 2. Share Foreign Value-Added (FVA) dan Domestic Value-Added (DVA) in Value Added Export dari ASEAN (Berdasarkan Subsektor Manufaktur)



Sumber: ASEAN-Japan Center's Database on Global Value Chain (ASEAN-Japan Centre 2018)

Pentingnya MNCs bagi terserapnya tenaga kerja di negara-negara berkembang kemudian mendasari berbagai bentuk fasilitasi perdagangan di bawah skema kerjasama-kerjasama ekonomi regional, seperti ASEAN Economic Community (AEC). Negara-negara sedang berkembang, yang memiliki banyak tenaga kerja dan sumber daya alam, seringkali memfokuskan pada posisinya sebagai *host countries* yang mendapatkan keuntungan dari MNCs dalam membuka lapangan pekerjaan. Dengan kemiripan keunggulan kompetitif diantara negara-negara anggota ASEAN, maka sistem produksi global atau lebih tepatnya sistem produksi regional menjadi salah satu poin yang diusung oleh AEC utamanya semenjak Krisis Finansial 1998 (ASEAN 2014). Saat ini negara-negara ASEAN semakin terintergasi dalam sistem produksi regional seiring dengan berbagai kerangka kebijakan tarif yang diusung AEC dalam rangkaian kerangka komunitas ekonomi regionalnya.

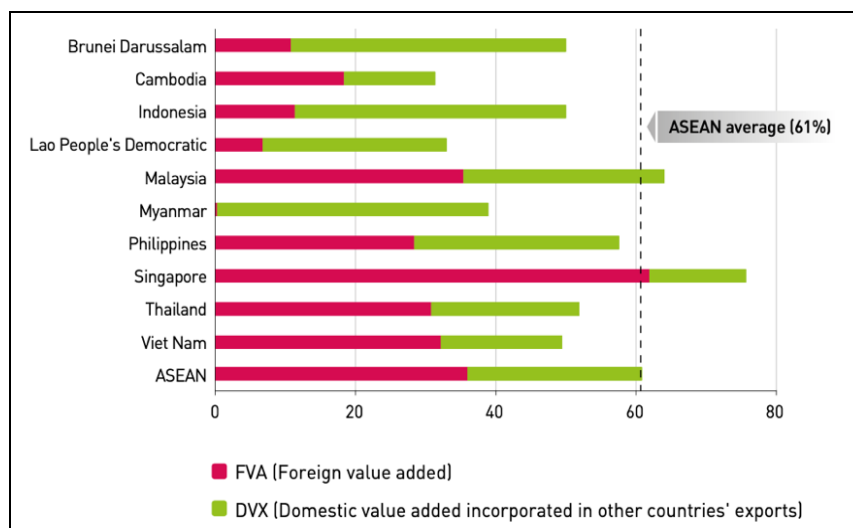
Pada intinya, tulisan ini hendak menggarisbawahi bahwa ada dualitas yang dapat kita observasi. Di satu sisi, terdapat pentingnya sebuah aksi kolektif dalam mengatasi isu pandemik yang mengancam keamanan seluruh manusia secara global. Di sisi lain, tulisan ini mengajukan argumen bahwa aksi kolektif dalam menangani COVID-19 juga memiliki nilai lebih sebagai suatu bentuk diplomasi yang dilandasi kepentingan ekonomi yang *tangible*. Keberlangsungan sistem produksi global sangat dipengaruhi oleh hubungan bilateral yang kondusif dan sekaligus bebas dari ancaman terhadap keselamatan manusia. Tenaga kerja tetap menjadi faktor produksi utama, walaupun saat ini kemajuan teknologi mulai menggantikan peran manusia.

¹ Tentu saja, masih banyak terdapat kritik mengenai keseimbangan hubungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang dalam konteks GVC ini. Tetapi tulisan ini tidak memberikan fokus terhadap masalah ini.

Kepentingan Ekonomi: Evaluasi Ekspansi GVC Jepang dan Korea Selatan di Indonesia

Seiring dengan semakin terintegrasinya negara-negara ASEAN dalam sistem produksi global, maka sektor manufaktur di Indonesia juga semakin bergantung kepada negara-negara partner *external* ASEAN. GVC di ASEAN didorong oleh pesatnya pertumbuhan dan ekspansi jaringan produksi regional di Asia Tenggara, yang melibatkan MNCs dan *domestic firms*. Pada 2018, *foreign direct investment* (FDI) *presence* di ASEAN lebih tinggi dibandingkan kawasan-kawasan sedang berkembang lain seperti COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) dan MERCOSUR. *Share* stok FDI dalam GDP di negara-negara ASEAN pada 2018 adalah 79 persen, sedangkan di COMESA hanya mencapai 37 persen. Sedangkan stok FDI di MERCOSUR adalah 29 persen pada tahun 2017. Keterlibatan ASEAN dalam GVC juga dapat dilihat dari fakta bahwa ASEAN sangat terlibat dalam berbagai kerjasama ekonomi multilateral di bidang perdagangan seperti the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, the Regional Comprehensive Economic Partnership (*under negotiation*), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (ASEAN-Japan Centre 2019, 12-14).

Gambar 3. Partisipasi Negara-Negara ASEAN dalam GVC tahun 2018



Sumber: “Global Value Chains in ASEAN: A Regional Perspective (Revised)” (ASEAN-Japan Centre 2019, 15).

Jika dilihat dari sektornya, maka sektor manufaktur adalah sektor utama yang sangat bergantung pada GVC. Sektor industri *resource-based*, seperti metal dan produk metal, makanan, minuman, dan rokok, adalah sektor yang banyak menggunakan *foreign inputs* dalam proses produksi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat terlibat dalam perluasan GVCs di ASEAN. Di sisi lain, sektor primer adalah sektor yang tidak banyak terintegrasi dalam GVC. Ekspor sektor primer, seperti *agriculture*, dan sektor pertambangan dan minyak lebih banyak didominasi oleh aktivitas domestik.

Sektor lain yang sangat bergantung pada *foreign inputs* dalam jumlah besar adalah otomotif dan elektronik. Sebagian besar MNCs di bidang otomotif memiliki pengaruh ekonomi yang besar di ASEAN. Indonesia, Malaysia dan Thailand merupakan produsen utama di bidang perakitan mobil (*parts and components*). Sektor otomotif di Indonesia lebih diarahkan pada pasar domestik, sedangkan Malaysia dan Thailand lebih diarahkan kepada ekspor (ASEAN-Japan Centre 2019, 18).

Adanya dominasi MNCs dalam sektor industri otomotif di negara-negara ASEAN, utamanya Indonesia, juga mempengaruhi adanya dominasi inventor asing dalam pendaftaran paten. Berdasarkan data dari ASEAN Patentscope dan World Intellectual Property Office, dapat dilihat bahwa mayoritas paten di negara-negara *middle-income* ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand) sebagian besar berada di sektor manufaktur. Dari total paten yang didaftarkan pada kantor paten nasional, dominasi inventor asing mencapai lebih dari 80 persen. Diantara paten-paten milik inventor asing ini, paten yang dimiliki oleh inventor asal Jepang berjumlah diatas 10 persen. Diantara tiga negara *middle-income* ASEAN, jumlah paten milik inventor yang berasal dari Jepang di Indonesia mencapai 30 persen dari total keseluruhan paten yang didaftarkan di kantor paten nasional (Tabel 3).

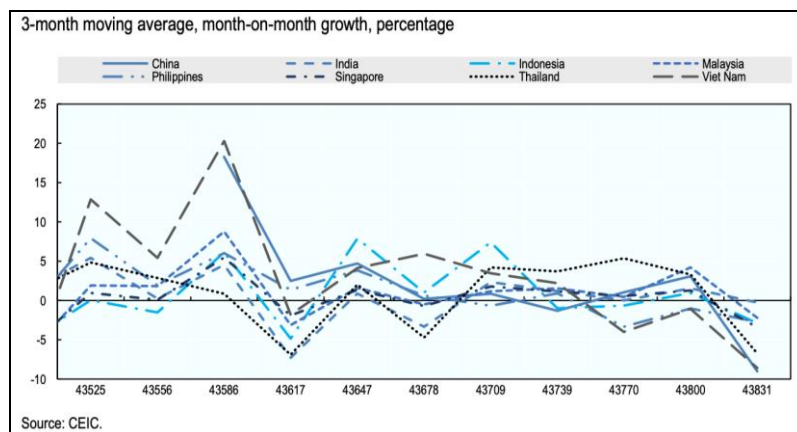
Tabel 1. Share Paten Terdaftar di Kantor Paten Nasional (Malaysia, Thailand, dan Indonesia)

	MYS (1986.08.18-2019.02.28)	THA (1980.08.13-2019.04.19)	IDN (1987.12.02-2019.07.05)
By Domestic Inventor and Applicants	10.6%	8.5%	17.7%
By Foreign Inventor and Applicants (total)	89.4%	91.5%	82.3%
- JPN (from total patents filed)	16.3%	14.8%	30.4%
- KOR (from total patents filed)	2.3%	2.1%	1.4%
- CHN (from total patents filed)	2.0%	1.1%	2.4%

Sumber: ASEAN Patentscope database (ASEAN PATENTSCOPE 2019)

Seiring dengan dalamnya integrasi ASEAN dalam GVC, maka semakin rentan pula negara-negara ini, termasuk Indonesia dalam resiko terkait penyebaran COVID-19 bagi GVC. Beberapa penelitian OECD terkini menunjukkan bahwa COVID-19 sangat berdampak bagi sistem produksi global, utamanya bagi sektor manufaktur. Dampak yang paling besar terkait dengan isu tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari dua permasalahan. Pertama, tingginya tingkat kematian tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang sakit berdampak pada ketersediaan tenaga kerja dan produktivitas mereka. Kedua, pemberlakuan *lockdown* dan jam malam sangat mempengaruhi sektor arus persebaran barang dan jasa, terutama ekspor (Gambar 4). Perusahaan-perusahaan manufaktur terkendala untuk mendapatkan bahan mentah ataupun barang setengah jadi. Rendahnya jumlah turis, sebagai akibat kebijakan *lockdown*, juga berdampak pada menurunnya pasar. Secara keseluruhan ini mengakibatkan banyak perusahaan manufaktur yang terancam bangkrut (OECD Development Centre, 2020a, 6-7).

Gambar 4. Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara Asia



Sumber: "COVID-19 in Emerging Asia" (OECD Development Centre 2020a, 7)

Berdasarkan perkiraan WTO, perdagangan dunia pada tahun 2020 diproyeksikan akan jatuh dengan perkiraan 13 persen hingga 32 persen yang disebabkan oleh persebaran COVID-19. ASEAN akan menerima dampak yang cukup besar dari sini. Pada pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) yang ke 26 di Viet Nam pada tanggal 10 Maret 2020, AEM mengeluarkan sebuah pernyataan berjudul “Strengthening ASEAN’s Economic Resilience in Response to the Outbreak of the Covid-19”. Melalui kebijakan respon terhadap COVID-19 ini, AEM menyatakan pentingnya kerjasama dengan partner eksternal ASEAN (Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, Republic of Korea, New Zealand, Russia, and the United States) dalam menangani masalah pandemic ini. AEM memfokuskan kepada perlunya ASEAN menekankan posisi strategis mereka dalam GVC melalui adanya ASEAN Single Window dan ASEAN Connectivity. AEM terus menekankan agar negara-negara ASEAN tidak mengambil langkah untuk menetapkan kebijakan non-tarif yang tidak diperlukan dan tetap menjamin kelancaran arus barang dan jasa (OECD Development Centre 2020b).

Diplomasi Kesehatan: Bantuan Penanganan COVID-19 dari Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia

Negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, memiliki posisi penting bagi MNCs dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Keberlangsungan produksi manufaktur di bawah sistem produksi global bergantung pada *host countries* seperti Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi *home countries* agar negara-negara seperti Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi keberlangsungan sistem produksi global di era pandemik ini. Selain itu, perkembangan negatif terkait COVID-19 di negara-negara *host* juga akan berdampak bagi keberlangsungan jangka panjang sistem produksi global yang pada akhirnya berdampak bagi MNCs. Oleh karena itu, hal yang menarik untuk didiskusikan di sini adalah bagaimana kemudian diplomasi yang dilakukan oleh negara Jepang dan Korea Selatan kepada Indonesia di era pandemik ini.

Selain diplomasi kesehatan secara global, pemerintah suatu negara juga dapat memberikan bantuan kesehatan melalui mekanisme diplomasi kesehatan bilateral. Di tengah pandemi yang juga dialami oleh masyarakat di negaranya, Pemerintah Jepang dan Korea Selatan justru mengirimkan bantuan berupa alat-alat kesehatan dan obat-obatan ke Indonesia. Seperti yang diketahui, Jepang dan Korea Selatan merupakan negara di Asia dengan jumlah kasus terinfeksi terbanyak. Dikatakan bahwa, Korea Selatan dan Jepang merupakan episentrum zona merah di Asia. Namun, dalam perkembangannya Korea Selatan dan Jepang justru berhasil mengatasi masalah Covid-19 dengan relatif baik dengan tingkat kematian yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Bahkan tingkat kematian di Korea Selatan dan Jepang relatif rendah dibandingkan negara-negara maju di Kawasan Eropa dan Amerika. Tulisan ini melakukan ringkasan singkat terhadap beberapa pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh aktor-aktor kunci.

a. Jepang

Tabel 2. Diplomasi Kesehatan Jepang ke Indonesia

No	Tanggal	Penyataan Resmi
1	27 Maret 2020	<p>Tentang: Pembicaraan telepon antara Jepang-Indonesia mengenai COVID-19</p> <p>Menteri Luar Negeri Jepang (Mr.MOTEGI): <i>“I already held a Japan-Indonesia Foreign Ministers’ Telephone Talk on March 23. We agreed that both our countries will closely cooperate to prevent the spread of the novel coronavirus.”</i></p>

2	07 April 2020	<p>Tentang: Dampak COVID-19 bagi diplomasi Jepang</p> <p>Menteri Luar Negeri Jepang (Mr.MOTEGI): <i>“However, it cannot be helped that there are some restrictions for the purpose of preventing the spread of the novel coronavirus. Nevertheless, diplomacy is important, so we will continue it in whatever ways we can. As telephone talks, teleconferences, and other meetings have been held dozens of times among the foreign ministers of various countries during the past two weeks or so, international sharing of information and expertise has been advanced. Furthermore, there has also been advancement of strengthening private and public sector cooperation as well as international cooperation for medication and vaccine development. Cooperation among various countries for border enforcement measures is also important.”</i></p> <p><i>“Also, amidst concerns about the spread of the novel coronavirus in developing countries, including countries in Africa, we can see that the entire international community has been agreeing to continue and strengthen support for these developing countries and Japan will provide Avigan in line with this policy. As for other matters, we will firmly advance the relevant measures as well.”</i></p>
3	14 April 2020	<p>Tentang: Peranan Jepang di dalam perekonomian global paska COVID-19</p> <p>Menteri Luar Negeri Jepang (Mr.MOTEGI): <i>“Moreover, we will consider our approach to global supply chains that has become evident due to the novel coronavirus, and enable supplies from multiple countries rather than relying on a single country. We will also provide support to restore domestic production of products that were produced overseas through now.”</i></p> <p><i>“In terms of developing countries, as we work to prevent the spread of the novel coronavirus in the first phase, we will take measures to advance international cooperation including bilateral grant aid, cooperation through international organizations, and medication and vaccine development.”</i></p> <p><i>“Also, in terms of what will be done for the development and recovery of the global economy after that, I believe that basically various countries will take the measures that I described for the second phase, and thus make their own economies recover. Additionally, I believe we will take the path of considering various new forms of economic assistance and other support at a stage when there may be countries, such as developing countries, where there is a delay in the recovery of the economy.”</i></p>
4	March 21, 2020 (Publication	<p>Tentang: Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen <i>Personal Protective Equipment</i> (PPE) terbesar di dunia</p>

	date)	<p>Menteri Keuangan Indonesia (Ms. Mulyani): <i>“Many countries desperately need PPE and require immediate supply to their country [...] But South Korea and Japan have agreed that we should meet domestic needs before helping other countries that lack PPE manufacturers.”</i></p>
5	March 24, 2020 (Publication date)	<p>Tentang: Kerjasama bilateral Indonesia-Jepang terkait COVID-19</p> <p>Menteri Luar Negeri Indonesia (Ms. Marsudi): <i>“Indonesia and Japan are committed to intensify bilateral, regional as well as international cooperation through the G-20 mechanism in fighting COVID-19”</i></p>
6	28 April 2020	<p>Tentang: Perkembangan terakhir status penyediaan Avigan bagi penanganan COVID-19</p> <p>Menteri Luar Negeri Jepang (Mr.MOTEGI): <i>“Amidst this, there have been several examples in which Avigan is effective for treatment. Such clinical research is of course being conducted in Japan, and we would like to spread it internationally. As I stated before, over 70 countries have indicated interest in this, and it has already been decided to provide Avigan to 38 countries. In addition, foreign countries that receive Avigan will provide clinical data to Japan. We are thus working with the sentiment that it is extremely important to quickly develop an effective medicine with international cooperation.”</i></p>

Note: Pernyataan resmi ini disadur dalam bahasa Inggris sesuai dengan apa yang dituliskan pada sumber resmi. Penulis tidak bertanggungjawab dalam kesalahan alih bahasa.

Sumber: Penulis berdasarkan Press Release MOFA Jepang (MOFA Japan, 2020a; MOFA Japan, 2020b; MOFA Japan, 2020c; MOFA Japan, 2020d) dan Media Massa (Jakarta Post, 2020a; Jakarta Post, 2020b)

b. Korea Selatan

Tabel 3. Diplomasi Kesehatan Korea Selatan ke Indonesia

No	Tanggal	Penyataan / Press Release Resmi
1	03 Maret 2020	<p>Tentang: Hasil Pembicaraan Telepon antara Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan dan Indonesia pada 03 Maret 2020</p> <p>Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Mr. Kang): <i>“Minister Kang explained that the ROK government has been making all-out efforts to curb the spread of COVID-19 by implementing government-wide, transparent, and preemptive measures.”</i></p> <p><i>“The Minister, asking for Indonesia’s continued confidence in the ROK government’s disease control capacity, extended appreciation to the country for not imposing an entry ban or other measures on Korean nationals.”</i></p>

		<p>Menteri Luar Negeri Indonesia (Ms. Marsudi): <i>“Minister Retno, highly commending the ROK’s disease control capacity, mentioned that COVID-19 cases had recently been confirmed in Indonesia and that the COVID-19 issue is one that all the countries should cooperate to resolve together.”</i></p> <p><i>“Minister Retno went on to say that, given close economic relations and active people-to-people exchanges with the ROK, Indonesia is not currently considering taking such measures as an entry ban on Koreans. She asked the ROK, on its part, to keep in place its entry policy for Indonesians.”</i></p> <p>Kedua Menteri Luar Negeri: <i>“ROK and Indonesia will be able to overcome the current situation together based on their friendly and trustful relations, and agreed to continue close communication between the governments of the two countries.”</i></p>
2	30 Maret 2020	<p>Tentang: Hasil Pembicaraan Telepon antara Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan dan Indonesia pada 28 Maret 2020</p> <p>Menteri Luar Negeri Indonesia (Ms. Marsudi): <i>“Minister Retno highly commended the ROK’s disease control capability, including its outstanding diagnostic testing capacity, and voiced hope to share the ROK’s experiences.”</i></p> <p><i>“Minister Retno mentioned that the recent, rapid spread of COVID-19 in Indonesia has led to shortages in protective equipment, and asked for the ROK’s assistance in this regard.”</i></p> <p>Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Mr. Kang): <i>“Minister Kang, sharing the concern over the COVID-19 situation in Indonesia, said that the ROK will provide as much assistance as it can, including protective equipment.”</i></p> <p>Kedua Menteri Luar Negeri: <i>“The two Ministers agreed to communicate candidly whenever necessary and work closely together in responding to COVID-19.”</i></p>
3	April 21, 2020	<p>Tentang: Ekspor Personal Protective Equipment (PPE) ke Korea</p> <p>Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana – COVID-19 Task Force (Mr. Monardo): <i>“Indonesia must export ready-to-use personal protective equipment (PPE) to South Korea as a form of compensation after the government bought raw materials from the country to meet domestic PPE production needs, COVID-19”</i></p> <p><i>“Doni said the deal was a common one between countries needing to meet their logistics needs and that Indonesia should not risk a raw materials shortage by</i></p>

		<p><i>not cooperating with other countries.”</i></p> <p><i>“Please understand that no country can meet its own needs”</i></p> <p>Menteri Keuangan Indonesia (Ms. Mulyani): <i>“Many countries desperately need PPE and require immediate supply to their country [...] But South Korea and Japan have agreed that we should meet domestic needs before helping other countries that lack PPE manufacturers.”</i></p>
4	April 25, 2020	<p>Tentang: Donasi <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR) dari Korea Selatan kepada Indonesia pada tanggal 24 April 2020 sebagai bagian dari total USD 500,000 bantuan luar negeri kepada Indonesia untuk menangani COVID-19, yang mengikuti pengiriman <i>electric pump sprayer</i> pada tanggal 8 April 2020.</p> <p>Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia (Mr. Kim): <i>“This donation of test kits is a follow-up to the South Korean government’s commitment to prioritize Indonesia in COVID-19 mitigation cooperation,”</i></p> <p>Direktur Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Mr. Darmosumarto): <i>“Santo Darmosumarto expressed his appreciation to South Korea. Seoul has been a strategic partner to Jakarta since 2017.”</i></p> <p><i>“We welcome and express our great appreciation to not only the South Korean government, but also its citizens who have always been close partners and friends to Indonesia”</i></p> <p>Kedutaan Besar Korea Selatan: <i>“We hope that the PCR test kits distributed by the government of the Republic of Korea can help improve the COVID-19 testing capacity of Indonesia, as the country is facing difficulties in procuring health equipment”</i></p>

Note: Pernyataan resmi ini disadur dalam bahasa Inggris sesuai dengan apa yang dituliskan pada sumber resmi. Penulis tidak bertanggungjawab dalam kesalahan alih bahasa.

Sumber: Penulis berdasarkan Press Release MOFA Korea Selatan (MOFA ROK, 2020a; MOFA ROK, 2020b) dan Media Massa (Jakarta Post, 2020b; Jakarta Post, 2020c)

Di Korea Selatan, dari 10.661 kasus terinfeksi, sebanyak 8.042 pasien berhasil sembuh atau setara 75.4%, dengan tingkat kematian hanya sebesar 2.1% atau 234 korban meninggal dunia (Azanella 2020). Sekjen PBB Antonio Guterres juga mengapresiasi langkah yang diterapkan oleh Pemerintah Korea Selatan, yang dinilai sukses mengatasi masalah Covid-19. Meskipun Pemerintah tidak pernah menerapkan kebijakan *lockdown* secara total, penerapan langkah tes secara masif, *tracing*, isolasi, dan pengawasan secara ketat dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Korea Selatan (CNBC Indonesia 2020).

Seperti halnya Korea Selatan, di Jepang tercatat 16.409 kasus terinfeksi, dengan total 678 korban meninggal dunia (CNN Indonesia 2020) atau setara 4.2% dari total keseluruhan.

Sebagai bentuk diplomasi kesehatan, dalam telewicara dengan Presiden Joko Widodo pada 23 April 2020, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan akan memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar US\$14.5 juta guna penanganan Covid-19 (Anon 2020) atau setara Rp.224 Miliar (Nugraha 2020). Secara lebih lanjut, dalam PM Abe menyatakan bahwa Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan teknis terhadap tenaga medis di Indonesia, bantuan material terhadap sarana medis melalui WHO dan UNICEF. Sebagai timbal baliknya, PM Abe meminta bantuan kerjasama pada Presiden Joko Widodo untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap warga negara Jepang di Indonesia serta stabilitas operasional bagi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia (Nugraha 2020). Sebelumnya, pada 7 April 2020 Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu juga menyatakan akan menghibahkan obat Avigan guna penanganan Covid-19 kepada sejumlah negara prioritas, termasuk Indonesia (CNN Indonesia 2020).

Di sisi lainnya, Pemerintah Korea Selatan melalui Dubes Kim Chang-Beom menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi Indonesia, berupa bantuan *in-kind* senilai US\$500.000 atau senilai Rp.8.1 miliar guna penanganan Covid-19 (Yuilyana, 2020). Hal tersebut disampaikan oleh Kim Chang-Beom ketika penyerahan 300 buah *disinfectant sprayer* kepada BNPB, pada 8 April 2020. Selain itu, Pemerintah Korsel juga memberikan bantuan 32.200 alat tes PCR (Nugraheny, 2020) yang dikenal lebih akurat ketimbang alat *rapid test*. Dalam pernyataannya, Dubes Korsel juga menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra utama dalam New Southern Policy Korea Selatan, sekaligus satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang memiliki Special Strategic Partnership (Kemitraan Strategis Khusus) dengan Korsel (Purnama 2020). Kim Chang-Beom juga menyatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan adalah teman sejati dan sehat, yang dekat di saat suka dan duka (Yuilyana 2020).

Selain bantuan dari Pemerintah Korea Selatan, Indonesia juga menerima bantuan dari beberapa perusahaan asal Korea Selatan, diantaranya bantuan dari Korea Aerospace Industries (KAI) bersama dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co yang menyerahkan 10.000 alat tes COVID-19 kepada Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Sunyoto 2020); LG Group menyumbang 500 alat tes dan Korea Midland Power (KOMIPO) juga berencana mengirimkan APD (Alat Pelindung Diri) senilai US\$ 100 ribu (Purnama 2020). Selain bantuan dari Jepang dan Korea Selatan, Menteri Retno Marsudi menyatakan setidaknya terdapat 9 negara yang berkomitmen memberikan bantuan kepada Indonesia terkait penanganan Covid-19, yakni Jepang, Amerika Serikat, Singapura, China, Vietnam, Korea Selatan, India, Australia, dan Uni Emirat Arab (CNN Indonesia 2020). Bantuan yang diberikan oleh sembilan negara tersebut meliputi peralatan medis seperti masker, APD, obat-obatan, alat *rapid test*, alat PCR, termometer, hingga ventilator (CNN Indonesia 2020).

Analisa & Penutup

Seperti yang dikemukakan oleh Carol Lancaster (2007) bahwa "*foreign aid was used for four main purposes: diplomatic, developmental, humanitarian relief, and commercial*". Dalam hal ini, bantuan luar negeri yang diberikan oleh Pemerintah Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, yang meliputi: diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan komersial. Secara lebih lanjut, Lancaster menjelaskan bahwa berkaitan dengan tujuan diplomatik, bantuan luar negeri dilakukan guna mencapai tujuan politik, seperti upaya untuk mempertahankan *sphere of influence* atau simbol untuk

menjaga hubungan baik antar pemerintah; dalam hal bantuan kemanusiaan, bantuan diberikan guna menunjang kapasitas dan sumber daya negara penerima untuk mengakomodasi atau memenuhi kebutuhan masyarakat; sedangkan tujuan komersial dikaitkan dengan upaya untuk melakukan ekspansi pasar (ekspor) serta mengamankan akses impor terhadap kebutuhan bahan mentah (Lancaster 2007).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masing-masing pemerintah telah mengemukakan bahwa bantuan yang diberikan sebagai salah satu upaya diplomatik guna menjaga hubungan baik antar pemerintah. Baik Pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah menjelaskan bahwa kedua negara berupaya untuk menjaga hubungan persahabatan yang telah dijalin sejak lama dengan Pemerintah Indonesia. Selain itu, bantuan juga diberikan sebagai upaya untuk menunjang kapasitas Pemerintah Indonesia, baik dari segi sumber daya maupun materi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna penanganan Covid-19. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan beserta dengan beberapa perusahaan multinasionalnya memberikan bantuan alat-alat kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan *rapid test* dan PCR sebagai deteksi dini bagi pasien Covid-19 serta peralatan medis dan obat-obatan untuk bagi pasien Covid-19 di Indonesia. Di sisi lainnya, bantuan yang diberikan oleh kedua negara terhadap Pemerintah Indonesia juga memiliki tujuan komersial. Seperti pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi yang menyebutkan bahwa pengiriman obat tersebut sebagai bentuk kerangka kerjasama *Government to Government* dan *Business to Business* (CNN Indonesia 2020).

Kasus Covid-19 menggarisbawahi sebuah benturan yang menarik. Di satu sisi, terdapat pentingnya sebuah aksi kolektif dalam mengatasi isu pandemik yang mengancam keamanan seluruh manusia secara global. Di sisi lain, aksi kolektif dalam menangani COVID-19 juga memiliki nilai lebih sebagai suatu bentuk diplomasi yang dilandasi kepentingan ekonomi yang bisa diobservasi. Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara yang memiliki peran besar bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia, utamanya bagi sektor produksi. Tulisan ini tidak bertujuan untuk mengkritisi adanya kepentingan ekonomi di balik diplomasi kesehatan. Kepentingan nasional, termasuk kepentingan ekonomi, adalah sebuah elemen utama diplomasi. Melalui kasus yang sudah diangkat, tulisan ini hendak menggarisbawahi dua hal: 1) bahwa seiring dengan semakin terkoneksi perekonomian negara-negara di dunia (yaitu melalui sistem produksi global), perekonomian global semakin rentan akan isu-isu kesehatan seperti pandemi Covid-19; 2) negara-negara berkembang, sebagai *host countries*, memiliki arti penting bagi negara-negara maju yang membutuhkan tempat produksi. Dengan menyadari arti penting inilah, maka kebijakan luar negeri dapat dimaksimalkan, utamanya ketika hal ini berkaitan erat dengan keamanan manusia.

Referensi

Anonim. (2020). *Jepang Sumbang 145 Juta Dollar Untuk Penanganan Corona Covid-19 di Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.liputan6.com/global/read/4237200/jepang-sumbang-145-juta-dolar-untuk-penanganan-corona-covid-19-di-indonesia> [Accessed 17 Mei 2020].

- ASEAN PATENTSCOPE, 2019. *ASEAN PATENTSCOPE*. [Online] Available at: <http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/patents?9> [Accessed 13 August 2019].
- ASEAN-Japan Centre, 2018. *ASEAN-Japan Centre's Database on Global Value Chains*. [Online] Available at: https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper1/
- ASEAN-Japan Centre, 2019. *Global Value Chains in ASEAN: A Regional Perspective (Revised)*, Tokyo: ASEAN-Japan Centre.
- ASEAN, 2014. *ASEAN Investment Report 2013-2014: FDI Development and Regional Value Chains*, Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Athukorala, P.-C., 2010. Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization. *ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration* 56, 07 April.
- Azanella, Luthfia Ayu. (2020). *Setelah Dua Bulan, Kasus Baru Covid-19 di Korea Selatan Turun Drastis*. [Online] Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/124200765/setelah-dua-bulan-kasus-baru-covid-19-di-korea-selatan-turun-drastis?page=2> [Accessed 17 Mei 2020].
- BBC News Indonesia. (2020). *Virus Corona: "Kemungkinan Covid-19 Tidak Akan Pernah Hilang", kata WHO*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52657058> [Accessed 17 Mei 2020].
- BBC News Indonesia. (2020). *Virus Corona: Peta dan Infografis Terkait Pasien Terinfeksi, Meninggal, dan Sembuh di Indonesia dan Dunia*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113> [Accessed 17 Mei 2020].
- BBC News Indonesia. (2020). *Virus Corona: WHO Peringatkan Pandemi Covid-19 "Meningkat Pesat"*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52013874> [Accessed 17 Mei 2020].
- BBC News. (2020). *Coronavirus Pandemic: Tracking the Global Outbreak*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/news/world-51235105> [Accessed 17 Mei 2020].
- CNBC Indonesia. (2020). *Sekjen PBB: Korea Selatan Sangat Sukses Atasi Wabah Covid-19!*. [Online] Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200501150352-4-155715/sekjen-pbb-korea-selatan-sangat-sukses-atasi-wabah-covid-19> [Accessed 17 Mei 2020].
- CNN Indonesia. (2020). *Data Virus Corona di Jepang Disangsikan*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200514132424-113-503319/data-kasus-virus-corona-di-jepang-disangsikan> [Accessed 17 Mei 2020].
- CNN Indonesia. (2020). *Jepang Kirim Hibah Obat Covid 19 Untuk Indonesia Bulan Ini*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200413123021-113-492984/jepang-kirim-hibah-obat-covid-19-untuk-indonesia-bulan-ini> [Accessed 17 Mei 2020].
- Cucinotta, D. dan Vanelli M. (2020). *WHO Declares Covid 19 as a Pandemic*. [Online] Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32191675> [Accessed 17 Mei 2020].

- Jakarta Post, 2020a. *Indonesia, Japan commit to 'cooperation' against COVID-19*. [Online] Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/24/indonesia-japan-commit-to-cooperation-against-covid-19.html> [Accessed 13 May 2020].
- Jakarta Post, 2020b. *COVID-19: Indonesia to export PPE to South Korea as compensation for raw materials*. [Online] Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/21/covid-19-indonesia-to-export-ppe-to-south-korea-as-compensation-for-raw-materials.html> [Accessed 13 May 2020].
- Jakarta Post, 2020c. *Test kits arrive as part of Seoul's US\$500k aid for Indonesia's COVID-19 fight*. [Online] Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/25/test-kits-arrive-as-part-of-seouls-us500k-aid-for-indonesias-covid-19-fight.html> [Accessed 13 May 2020].
- Kickbusch, Ilona, et.al. (2007). *Global Health Diplomacy: the Need for New Perspectives, Strategic Approaches and Skills in Global Health*. *Bulletin of the World Health Organization* Vol.85 No.3. [Online] Available at: <https://www.who.int/bulletin/volumes/85/3/06-039222/en/Pp.161-244> [Accessed 17 Mei 2020].
- Lancaster, C., 2007. *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago: the University of Chicago Press.
- MOFA Japan, 2020a. *Press Conference by Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu (March 27, 2020, 5:29 p.m.)*. [Online] Available at: https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000774.html [Accessed 13 May 2020].
- MOFA Japan, 2020b. *Press Conference by Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu (April 7, 2020, 11:15 a.m.)*. [Online] Available at: https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000777.html [Accessed 13 May 2020].
- MOFA Japan, 2020c. *Press Conference by Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu (April 14, 2020, 10:52 a.m.)*. [Online] Available at: https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000779.html [Accessed 13 May 2020].
- MOFA Japan, 2020d. *Press Conference by Foreign Minister MOTEGI Toshimitsu (April 28, 2020, 2:47 p.m.)*. [Online] Available at: https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000787.html [Accessed 13 May 2020].
- MOFA ROK, 2020a. *Outcome of ROK-Indonesia Foreign Ministers' Telephone Conversation on Mar. 3*. [Online] Available at: http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=320994 [Accessed 13 May 2020].
- MOFA ROK, 2020b. *Outcome of ROK-Indonesia Foreign Ministers' Telephone Conversation*. [Online] Available at: http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=321032&srchFr=&%3BsrchTo=&%3BsrchWord=&%3BsrchTp=&%3Bmulti_itm_seq=0&%3Bitm_seq_1=0&am p%3Bitm_seq_2=0&%3Bcompany_cd=&%3Bcompany_nm [Accessed 13 May 2020].
- Neilson, J., Pritchard, B. & Yeung, H. W.-c., 2014. *Global value chains and global production networks in the changing international political economy: An introduction*. *Review of International Political Economy*, 21(1), pp. 1-8.
- Nugraha, Fajar. (2020). *Jepang Bantu Dana Rp.224 Miliar ke Indonesia Lawan Covid-19*. [Online] Available at: <https://www.medcom.id/internasional/asean/akW5xELN->

- jepang-bantu-dana-rp224-miliar-ke-indonesia-lawan-covid-19 [Accessed 17 Mei 2020].
- Nugraheny, Dian Erika. (2020). *Korea Selatan Serahkan Bantuan Alat Tes PCR Untuk Indonesia*. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/19051501/korea-selatan-serahkan-bantuan-alat-tes-pcr-untuk-indonesia>
- OECD Development Centre, 2020a. *COVID-19 in Emerging Asia*. [Online] Available at: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-in-emerging-asia-regional-socio-economic-implications-and-policy-priorities-dao8foof/> [Accessed 13 May 2020].
- OECD Development Centre, 2020b. *COVID-19 Crisis Response In ASEAN Member States*. [Online] Available at: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129949-ehsuoqs87y&title=COVID-19-Crisis-Response-in-ASEAN-Member-States [Accessed 13 May 2020].
- Purnama, Basuki Eka. (2020). *Korsel Salurkan Bantuan Covid-19 Untuk Indonesia*. [Online] Available at: <https://mediaindonesia.com/read/detail/302454-korsel-salurkan-bantuan-covid-19-untuk-indonesia>.
- Saputra, Eka Yudha. (2020). *WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi, Apa Maksudnya?*. [Online] Available at: <https://dunia.tempo.co/read/1318511/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-apa-maksudnya/full&view=ok> [Accessed 17 Mei 2020].
- Sunyoto. Mulyo. (2020). *Perusahaan Korsel Serahkan Bantuan Alat Tes Covid-19 Untuk Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.antaranews.com/berita/1451676/perusahaan-korsel-serahkan-bantuan-alat-tes-covid-19-untuk-indonesia>.
- The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2020. *Indonesia Successfully Passes the First UN Resolution on Global Solidarity to Overcome COVID-19*. [Online] Available at: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1160/berita/indonesia-successfully-passes-the-first-un-resolution-on-global-solidarity-to-overcome-covid-19#:~:text=%E2%80%8BNew%20York%2C%20United%20States,Nations%20Headquarters%20in%20New%20York> [Accessed 15 Juni 2020].
- UNDP, 2006. *The Human Security Framework and National Human Development Report*, New York: UNDP.
- UNESCAP, 2015. *Global Value Chains, Regional Integration and Sustainable Development: Linkages and Policy Implications. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 71st Session*, 25-29 May.
- UNGA. (2020). *Global Solidarity to Fight the Coronavirus Disease (Covid-19)*. [Online] Available at <https://www.un.org/pga/74/2020/03/30/global-solidarity-to-fight-covid-19/> [Accessed 15 Juni 2020].
- UNIDO, 2019. *UNIDO Manufacturing Profile*. [Online] Available at: <https://stat.unido.org/country-profile/economics> [Accessed 10 August 2019].
- WHO. (2020). *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus*. [Online] Available at: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> [Accessed 17 Mei 2020].

- WHO. (2020). *WHO Director General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 – 11 May 2020*. [Online] Available at: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-may-2020> [Accessed 17 Mei 2020].
- Yuilyana. (2020). *Korea Selatan Berikan Bantuan Bertahap Untuk Indonesia Atasi Pandemi Corona*. [Online] Available at: <https://www.kompas.tv/article/75278/korea-selatan-berikan-bantuan-bertahap-untuk-indonesia-atasi-pandemi-corona>